



RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA 2024

Jl. Alianyang No. 7 SINGKAWANG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renja disusun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Penyusunan Renja OPD tahun 2024, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena Renja 2024 telah dispesifikkan mengikuti kaidah Permendagri nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan tentunya juga memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan seperti RPJMD dan Renstra OPD.

Renja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, memuat kondisi umum, isu-isu strategis, sasaran pokok dan prioritas yang menjadi agenda pembangunan bidang kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang untuk tahun anggaran 2024. Dengan adanya Renja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, diharapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan pihak-pihak terkait lainnya memiliki pedoman atau acuan untuk merencanakan program dan kegiatan prioritas yang akan dibiayai dengan APBD, APBN maupun sumber pendanaan lainnya.

Pada akhirnya kami sangat menyadari bahwa Renja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu koreksi dan saran sangat kami harapkan dari seluruh komponen kesehatan maupun pihak-pihak yang terkait lainnya untuk perbaikan Renja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang di tahun yang akan datang, namun demikian semoga Renja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang ini dapat berguna bagi kita semua.

Singkawang, Oktober 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Dan Keluarga Berencana



Dr. Alexander, Sp.PD

NIP.19711219 200502 1 003

Daftar isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Dokumen RKPD	5
BAB II Hasil Evaluasi RENJA Dinas Kesehatan dan KB Tahun 2023	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD dan Hal Kritis Yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah	34
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	37
BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	38
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	40
3.3 Program dan Kegiatan	41
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	44
BAB V Penutup	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang seoptimal mungkin. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan akan berdampak pada terwujudnya pola peningkatan dan produktivitas masyarakat secara mandiri, sehingga kualitas Sumber Daya Manusia yang menjadi tujuan *outcome* dari pembangunan kesehatan menjadi nyata.

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Kemudian dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD dan RPJMD serta RKPD.

Sebagai dokumen perencanaan rencana Kerja tahunan Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut : 1). Renja SKPD adalah dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) instansi sesuai arahan operasional dalam Renja-RKPD, 2). Renja SKPD juga salah satu instrumen guna melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, dalam melihat capaian indikator yang telah ditetapkan, baik di tingkat Pusat/Kementerian Kesehatan dan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) maupun di tingkat Provinsi.

Renja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana juga tidak terlepas dari penyusunan rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) untuk pedoman penyusunan rancangan Renja yang disusun dalam periode 1 (satu) tahun. Dokumennya bersifat indikatif yang memuat kebijakan, Visi, Misi, Sasaran Strategis, Program, Kegiatan kesehatan yang akan dilaksanakan tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta aparatur. Selain itu keberhasilan tersebut perlu memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber daya organisasi dan lingkungan organisasi. Interaksi berbagai sumber daya pada akhirnya

menentukan perumusan strategi dan target kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Dokumen Renja memuat program pembangunan kesehatan Kota Singkawang dengan indikator kerjanya masing-masing, memuat usulan dari Pokok Pikiran, dan hasil dari Musrenbang di tingkat kecamatan dengan memperhatikan kondisi dan sinergitas dan saling melengkapi dengan rencana pembangunan kesehatan lainnya. Karena itu, Renja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang ini dipandang sebagai suatu *rolling plan*, yakni suatu rencana yang secara reguler dan sistematis dapat dikaji kembali untuk disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan internal maupun eksternal, seperti perubahan aturan yang terkait dengan sektor kesehatan dan KB, kondisi keuangan Negara/daerah, transisi epidemiologi, iklim politik, dan kondisi eksternal lainnya yang mempengaruhi asumsi-asumsi dalam penyusunan Renja ini.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPd. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2020;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
20. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.
21. Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang Nomor 000.7/339/PPMPI-C tanggal 23 Juni 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang Tahun 2024
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penyusunan Renja 2024 bermaksud untuk memberikan arah sekaligus sebagai pedoman bagi seluruh aparatur organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Dalam penyelenggaraan program kerjanya dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang.

Sedangkan Tujuan dari Renja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang ini meliputi:

1. Sebagai Pedoman Teknis dan strategi dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pembangunan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kota Singkawang.
2. Memberikan arah pembangunan kesehatan berupa gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang dalam satu tahun anggaran.

3. Menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang sesuai tugas pokok dan fungsinya.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota, antar fungsi Pemerintah, Pemerintah Kota Singkawang, dan pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD.

Merujuk pada sistematika penulisan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta memperhatikan kemudahan pemahaman semua pihak, maka dokumen ini dibagi menjadi lima BAB yaitu :

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1 Latar Belakang yaitu Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 Landasan Hukum yaitu Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah..
- 1.3 Maksud dan Tujuan yaitu Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah..
- 1.4 Sistematika Penulisan yaitu Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai: 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SINGKAWANG

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:
 - a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Berisikan penjelasan mengenai: (1) Pencapaian SDGs, (2) Pengentasan kemiskinan, (3) Pengentasan kemiskinan, (4) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, (5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
 - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: (1) Jumlah program dan jumlah kegiatan. (2) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). (3) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

berisi Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, beserta uraian penjabaran dari tabel program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Secara umum pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan hasil capaian indikator pada tahun 2022 yakni tahun lalu dan pertengahan tahun berjalan, pada tahun 2023. Selanjutnya dasar dari keberhasilan capaian disesuaikan dengan Target RENSTRA Perubahan Tahun 2023-2026.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang tahun lalu dan realisasi RENSTRA mengacu pada hasil laporan kinerja satu tahun 2022 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, dan/atau realisasi APBD Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Pengukuran kinerja pada program tahun 2022 berdasarkan indikator yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mana ada 44 indikator kesehatan, 10 indikator provinsi di bidang kesehatan dan 31 indikator untuk sektor Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk. Adapun target, capaian dan kriteria dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022	Kriteria
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	-	-	7,58	6,00	8,37	139,50	Kurang
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	-	-	992.42	995.00	991.63	99.66	Baik
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	-	-	1,64	0,80	1,49	186,25	Kurang
4	Angka Kematian neonatal per 1000 Kelahiran Hidup	-	-	6.87	3.40	5.30	155.88	Kurang
5	Rasio Posyandu per satuan balita	-	-	7.06	10.00	6.77	67.70	Kurang
6	Rasio Puskesmas, Poliklinik, pustu persatuan penduduk	-	-	0.20	0.30	029	96.67	Baik
7	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	-	-	0.03	0.04	0.02	50.00	
8	Rasio dokter per satuan penduduk	-	-	0.78	1.00	0.84	83.76	kurang
9	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	-	-	4.47	1.00	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022	Kriteria
10	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	SPM	IKK	59.34	80.00	52.95	66.19	Kurang
11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	SPM	IKK	88.59	100	72.45	72.45	Kurang
12	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	SPM	IKK	46.15	-	-		
13	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	SPM	IKK	100	100	100	100	baik
14	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.200 Kkal/kapita/hari)	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	-	-	74.4	100	35.50	35.50	kurang
16	Non folio AFP rate per 100.000 penduduk	-	-	1.59	2.00	2.00	100	baik
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	-	-	48.6	-	-	-	
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	-	-	37.17	90.00	65.50	106.96	
19	Tingkat Prevalensi Tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	-	-	-	-	-	-	
20	Tingkat kematian karena tuberkolosis (per 100.000 penduduk)	-	-	-	-	-	-	
21	Proporsi Jumlah kasus tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	-	-	-	-	-	-	
22	Proporsi kasus tuberkolosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	-	-	-	-	-	-	
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	-	-	100	100	-	100	
24	Penderita diare yang ditangani	-	-	39.74	-	-	0	
25	Angka kejadian malaria	-	-	-	-	-	-	
26	Tingkat kematian akibat malaria	-	-	-	-	-	-	

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022	Kriteria
27	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
28	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
29	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
30	Penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko tinggi terakhir	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
31	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
32	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	-	-	9.23	100			n/a
33	Cakupan kunjungan bayi	-	-	67.76	100	48.28	48.28	
34	Cakupan puskesmas	-	-	-	100	100	100	Sangat baik
35	Cakupan pembantu puskesmas	-	-	-	17.00	16.00	94.12	baik
36	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	SPM	IKK	91.5	100	75.74	75.74	
37	Cakupan pelayanan nifas	SPM	IKK	84.63	100	70.62	70.62	
38	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	SPM	IKK	47.86	80.00	40.40	50.50	
39	Cakupan pelayanan anak balita	SPM	IKK	42.53	100	22.62	22.62	
40	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	SPM	IKK	9.94	100	99.60	99.60	
41	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	SPM	IKK	90.23	100	41	41	
42	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	SPM	IKK	109.11	n/a	n/a	n/a	
43	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	-	-	100	100	100	100	
44	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jamV	-	-	100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022	Kriteria
1	Persentase penemuan pneumonia pada balita berdasarkan perkiraan kasus (incidence rate) pneumonia pada balita (2,12% dari penduduk)	-	-	-	70.00	24.60	35.14	
2	Persentase penemuan penderita diare dari perkiraan kasus (incidence rate) penyakit diare (2,14 % dari penduduk)	-	-	100	100	32.70	32.70	
3	Angka penemuan kasus baru kusta dari perkiraan kasus (incidence rate) penyakit kusta (0,3) per 100.000 penduduk	-	-	0.00	100	28.50	28.50	
4	Angka kesakitan (incidence rate dan Annual parasite incidence / API) Malaria	-	-	0.00	<1%	0.00	0.00	
5	Angka Kematian (case fatality rate/ CFR) Rabies	-	-	0.00	0.00	1.01	0.00	
6	Angka kesakitan (incidence rate/R) DBD	-	-	107.00	<47/100.000	39.75	n/a	
7	Angka Kematian (case fatality rate/CFR) DBD	-	-	1.00	<1%	1.04	n/a	
8	Angka bebas jentik (ABJ)	-	-	95.00	>95%	73.79	n/a	
9	Angka keberhasilan pengobatan pasien tbc semua kasus (Sycces Rate)	-	-	90.00	90.00	79.80	88.67	
10	Persentase ODHA mendapat ART			50.00	95.00	48.20	50.74	
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, meliputi:								
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	-	-	2,09	2,10	1,61	76,67	Sedang
2	Total Fertility Rate (TFR)	-	-	2,26	2,10	2,34	111,43	Sangat Baik
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	-	-	5.00	5.00	-	-	
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/ Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	-	-	18.20	100	-	0.00	
5	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022	Kriteria
6	Jumlah sector yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	-					
7	Jumlah sector yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	-	-		7.00	7.00	100	
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	-	-	n/a	2.10	2.34	111.43	
9	Rasio Akseptor KB	-	-	49.80	85.00	n/a	n/a	
10	Angka pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	-	-	n/a	62.16	n/a	n/a	
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	-	-	n/a	24.00	28.00	116.67	
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	-	-	n/a	8.16	n/a	n/a	
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKPJ)	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	-	-	n/a	84.00	n/a	n/a	
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	-	-	n/a	63.00	n/a	n/a	
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan	-	-	100	100			

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022	Kriteria
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	-	-	15.00	100	640	640	
21	Cakupan PKB/ PKLB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pengendalian penduduk	-	-	19.00	100.00	7.00	7.00	
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	-	-		35.00	349.00	997.14	
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	-	-	100	100.00	26.00	26.00	
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	-	-	52.00	100.00	100.00	100.00	
25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	-	-	0.17	63.00	62.00	98.41	
26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a	

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
 - a. Realisasi program yang tidak memenuhi target berdasarkan realisasi anggaran adalah :
 - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), sebesar 70% dari target sebesar 100%.
 - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, sebesar 75% dari target sebesar 100%.
 - Program pengendalian penduduk, capaian berdasarkan realisasi anggaran sebesar 50%, dari target 100%.
 - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), sebesar 64%, dari target 100%.
 - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, sebesar 33% dari target 100%.
 - b. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target berdasarkan realisasi anggaran adalah :
 - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, sebesar 67%.
 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sebesar 70%.
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sebesar 60%.
 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota, sebesar 50%.
 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga, sebesar 0 %.
 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, sebesar 0%.
 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, sebesar 40%.
 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, sebesar 67%.

- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, sebesar 50%.
 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, sebesar 33%.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- a. Realisasi program yang telah memenuhi target berdasarkan realisasi anggaran adalah :
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebesar 96%.
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar 100%.
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, sebesar 100%.
- b. Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target berdasarkan realisasi anggaran adalah :
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, mencapai 100%.
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, mencapai 100%.
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, mencapai 100%.
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah, mencapai 100%.
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mencapai 100%.
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mencapai 100%.
 - Peningkatan Pelayanan BLUD, mencapai 100%.
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, mencapai 100%.
 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, mencapai 100%.

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sebesar 100%.
 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), sebesar 100%.
 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, sebesar 100%.
 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan Restoran dan Depot Air Minum (DAM), sebesar 100%.
 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten Kota, sebesar 100%.
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sebesar 100%.
 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, sebesar 100%.
 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), sebesar 100%.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Tidak ada satupun program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran, yang telah ditetapkan pada RENSTRA 2023-2026 Dinas Kesehatan dan KB.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- a. Program/kegiatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)/ Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sebesar 70% dari target sebesar 100%. Tidak tercapainya target 100% disebabkan antara lain :

- Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan tidak dapat direalisasikan disebabkan sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Puskesmas masih dalam kondisi baik. Sehingga anggarannya dikembalikan.
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan hanya direalisasikan sebesar 50%, karena panitia pengadaan dapat melakukan lelang secara efisien dan efektif.
- b. Program/kegiatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)/Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar 60% dari target sebesar 100%. Tidak tercapainya target 100% disebabkan antara lain :
- Sub kegiatan pengampu bidang Kesehatan masyarakat khususnya pada upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang menangani kesehatan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir, balita, usia anak sekolah dan usia produktif, total capaiannya sebesar 55,72%. Begitu juga pengampu bidang Penanggulangan Penyakit (P2) terkait upaya pemenuhan SPM seperti Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut, penderita hipertensi, penderita diabetes mellitus, orang dengan gangguan jiwa berat, orang terduga tuberculosis, dan orang dengan risiko terinfeksi HIV, total capaiannya sebesar 56,25%. Penyebabnya tidak tercapai target yakni : (1). Data sasaran terlampaui besar, disamping disparitas data sasaran antara Kementerian Kesehatan RI, dan Dinas Catatan Sipil Kota Singkawang, terhadap sasaran jumlah penduduk. (2) Adanya perbedaan definisi operasional yang dikeluarkan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan terkait SPM berbeda, sehingga capaian tidak akan mungkin didapat. (3). Anggaran terbatas, baik dari Dana DAU maupun dari dana APBN (DAK Non fisik) sehingga beberapa sub kegiatan hanya sebagian yang bisa dianggarkan. (4). Kurangnya pemahaman atau keseriusan pengelola program terhadap alokasi anggaran terhadap pemenuhan sub kegiatan guna meningkatkan capaian target.
 - Sub kegiatan yang tidak sama sekali dilaksanakan yaitu : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya, Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan

(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal), Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga, dan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis. Capaian sub kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan lebih kepada permasalahan yang tidak muncul di tahun 2022, adanya kesalahan memasukkan belanja yang sudah tidak relevan lagi dilaksanakan, serta adanya kesalahan kode rekening yang di entry pada saat memasukkan kode belanja pada sub kegiatan diatas.

- c. Program/kegiatan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)/ Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota sebesar 50% dari target sebesar 100%. Tidak tercapainya target 100% disebabkan antara lain :
- Tidak terlaksananya sub kegiatan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan, karena belum adanya petunjuk teknis perumusan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan.
- d. Program/Kegiatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman/Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga sebesar 0% dari target sebesar 100%. Tidak tercapainya target sebesar 100% disebabkan antara lain :
- Adanya sub kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan, tidak dilaksanakan dikarenakan belum ada petunjuk teknis pelaksanaan sub kegiatan tersebut. Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang terkait program/kegiatan diatas, telah mencapai 100%.
- e. Program/Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, sebesar 0% dari target sebesar 100%. Tidak tercapainya target disebabkan antara lain :
- Tidak diakomodirnya sub kegiatan pada Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga dan sub kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

- Adanya pelaksanaan sub kegiatan berdasarkan arahan dari atas ke bawah, artinya pelaksanaan program pengendalian penduduk diatur mulai dari Pusat, Provinsi dan didistribusikan ke Kabupaten/Kota.
- f. Program/Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, sebesar 40% dari target sebesar 100%. Tidak tercapainya target disebabkan antara lain :
- Ada 3 sub kegiatan yang mendukung program/kegiatan ini yang tidak dilaksanakan yaitu (1) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja. (2) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK, dan (3) Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK. Ketiga sub kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya ketidaksiapan bidang untuk melaksanakannya disamping kebijakan yang menunggu dari atas untuk dilimpahkan ke bawah.
- g. Program/kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, sebesar 67%. Tidak tercapainya target disebabkan antara lain :
- Tidak terlaksananya sub kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, disebabkan kurangnya waktu dan SDM dalam pelaksanaan penyediaan sarana penunjang pelayanan KB, sehingga anggaran tidak direalisasikan sama sekali. (0%).
- h. Program/kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, sebesar 50% dari target 100%. Tidak tercapainya target disebabkan antara lain :
- Tidak terlaksananya sub kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB, disebabkan kurangnya SDM dalam mengelola sub kegiatan tersebut.
 - Tidak menjadi prioritas dalam melaksanakan, guna mendongkrak peran serta organisasi masyarakat dalam upaya pembinaan kesertaan ber-KB.

- i. Program/Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, sebesar 33% dari target 100%. Tidak tercapainya target disebabkan antara lain :
- Tidak terlaksananya sub kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - Kurangnya responsif bidang dalam mengelola sub kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
 - Tidak ada arahan dari pusat maupun provinsi untuk melaksanakan sub kegiatannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, jika dilihat dari capaian target output dari masing-masing program pengampu SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang begitu jauh dari apa yang diharapkan, dimana termaktub dalam Renstra Dinas dan Keluarga Berencana Tahun 2023-2026 yaitu dengan target capaian sebesar 100%. Sesuai arah kebijakan Pusat yaitu Kementerian Kesehatan yang menetapkan target SPM sebesar 100%. Sementara capaian yang didapat dari hasil laporan SPM yang bersumber dari hasil olahan sub bagian Perencanaan didapat jauh lebih rendah dari target, bahkan ada beberapa capaiannya dibawah 50%.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya sebagai berikut :
- a. Semua pemegang program harus mengetahui atau dapat mengidentifikasi permasalahan yang diintervensi yang tertuang pada sub kegiatan serta diidentifikasi dan dilakukan intervensi, khususnya permasalahan lanjutan yang berkaitan target sasaran pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tingkat Propinsi, RPJMD tingkat Kota Singkawang, yang memerlukan kesamaan gerak dan menjadi acuan dalam upaya koordinasi maupun intervensi antar program serta dengan lintas sektor terkait.
 - b. Penguatan data capaian dan sasaran antar program dan lintas sektor,

sehingga dibutuhkan kegiatan advokasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam rangka terwujud sinergitas antara program kegiatan dalam menetapkan sasaran untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMN, RPJMD maupun RENSTRA OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

- c. Peningkatan manajemen penanganan kejadian Wabah atau Kejadian Luar Biasa pada penyakit Menular, sehingga dapat mempercepat upaya memutus mata rantai penularan penyakit menular. Dengan menerapkan langkah-langkah epidemiologi, yang terukur dan terstruktur.
- d. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan, baik dari sisi sarana prasarana, maupun dari Sumber Daya Manusia yang memiliki kapabilitas dan integritas yang tinggi pada pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.
- e. Penguatan dan penentuan data sasaran yang akurat, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan melakukan koordinasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta dengan BPS Kota Singkawang sehingga menjadi acuan mulai dari tingkat Kota, Provinsi dan bahkan tingkat Nasional.
- f. Penguatan mutu layanan kesehatan, dengan melakukan secara terus menerus peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya yang ada.
- g. Optimalisasi manajemen pelayanan kesehatan dan perencanaan Sumber Daya Manusia kesehatan, melalui pola PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) dan melakukan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- h. Penguatan peran dan fungsi Kepala Bidang dan sub Koordinator di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga terjadi sinkronisasi antara Pusat, Provinsi dan daerah, dalam hal ini Kota Singkawang.
- i. Melakukan asistensi, dan konsultasi terkait program/kegiatan maupun sub kegiatan yang melekat di bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga terjadi efektivitas dalam mencapai target-target yang ditetapkan.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
KOTA SINGKAWANG

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	%		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana									
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8	8				
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok		2	2	100%	6 Dok	8 Dok	133%
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Lap		2	2	100%	2 Lap	4 Lap	200%
1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap		4	4	100%	4 Lap	8 Lap	200%
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1162	1162		0 0	1,162	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	475 orang		560	560	100%	475 orang	1,035 orang	218%
1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok		1	1	100%	1 Dok	2 Dok	200%
1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	550 Dok		600	600	100%	550 Dok	1,150 Dok	209%
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap		1	1	100%	1 Lap	2 Lap	200%

1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				2	2		0	0	2	
1.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dok		1	1	100%	2	dok	3 dok	150%
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		1	1	100%	6	Laporan	7 Laporan	117%
1.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1	1	100%	1	Dokumen	2 Dokumen	200%
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				200	200		0	0	200	#DIV/0!
1.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok		100	100	100%	1	Dok	101 Dok	10100%
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok		100	100	100%	1	Dok	101 Dok	10100%
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				160	160		0	0	160	#DIV/0!
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		12	12	100%	1	Paket	13 Paket	1300%
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		12	12	100%	1	Paket	13 Paket	1300%
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		12	12	100%	1	Paket	13 Paket	1300%
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		12	12	100%	1	Paket	13 Paket	1300%
1.021.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 media		12	12	100%	1	media	13 media	1300%
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap		100	100	100%	1	Lap	101 Lap	10100%
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2	2		0	0	2	#DIV/0!
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	40 Bangunan		1	1	100%	40	Bangunan	41 Bangunan	103%
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	98 Orang		1	1	100%	98	Orang	99 Orang	101%

1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20	20		0	0	20	#DIV/0!
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Mobil		18	18	100%	28	Mobil	46 Mobil	164%
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		1	1	100%	100	Unit	101 Unit	101%
1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		1	1	100%	1	unit	2 unit	200%
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				10	10		0	0	10	#DIV/0!
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	10 Unit		10	10	100%	10	Unit	20 Unit	200%
1.02.02	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)				1769	1870		0	0	1,870	#DIV/0!
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				303	303		0	0	303	#DIV/0!
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	150 unit		150	150	100%	150	unit	300 unit	200%
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 paket		1	1	100%	1	paket	2 paket	200%
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 paket		1	1	100%	1	paket	2 paket	200%
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	10 unit		1	1	100%	10	unit	11 unit	110%
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	200 unit		150	150	100%	200	unit	350 unit	175%
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1423	1524		0	0	1,524	#DIV/0!
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5378 Orang		100	100	100%	5378	Orang	5,478 Orang	102%
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3857 Orang		100	100	100%	3857	Orang	3,957 Orang	103%
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3673 orang		100	100	100%	3673	orang	3,773 orang	103%
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19099 orang		100	100	100%	19099	orang	19,199 orang	101%

1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	40608 orang		100	100	100%	40608 orang	40,708 orang	100%
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	189766 Orang		100	100	100%	189766 Orang	189,866 Orang	100%
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28837 orang		100	100	100%	28837 orang	28,937 orang	100%
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	95081 orang		100	100	100%	95081 orang	95,181 orang	100%
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7993 Orang		100	100	100%	7993 Orang	8,093 Orang	101%
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	626 Orang		100	100	100%	626 Orang	726 Orang	116%
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5449 Orang		100	100	100%	5449 Orang	5,549 Orang	102%
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7271 Orang		100	100	100%	7271 Orang	7,371 Orang	101%
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 dok		1	1	100%	1 dok	2 dok	200%
1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	dok		1	1	100%	0 dok	1 dok	#DIV/0!
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.4 %		53	53	100%	4.4 %	57 %	1305%
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 dok		68	68	100%	5 dok	73 dok	1460%
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 dok		1	1	100%	1 dok	2 dok	200%
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 dok		5	5	100%	5 dok	10 dok	200%
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	95 %		85	85	100%	95 %	180 %	189%
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 dok		1	1	100%	1 dok	2 dok	200%

1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket		1	1	100%	0	Paket	1 Paket	#DIV/0!
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 dok		1	1	100%	1	dok	2 dok	200%
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	10 Unit		7	7	100%	10	Unit	17 Unit	170%
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	lap					0	lap	- lap	#DIV/0!
1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Orang		100	100	100%	0	Orang	100 Orang	#DIV/0!
1.02.02.2.02.40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang					0	Orang	- Orang	#DIV/0!
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi							0	0	-	#DIV/0!
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 dok		1	1	100%	1	dok	2 dok	200%
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota				43	43		0	0	43	#DIV/0!
1.02.02.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	49 Unit		43	43	100%	49	Unit	92 Unit	188%
1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	dok					0	dok	- dok	#DIV/0!
1.02.03	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan				113	113		0	0	113	#DIV/0!
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				13	13		0	0	13	#DIV/0!
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	20 dok		13	13	100%	20	dok	33 dok	165%

1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100	100		0	0	100	#DIV/0!
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 orang		100	100		0	orang	100 orang	#DIV/0!
1.02.04	3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman				200	200		0	0	200	#DIV/0!
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				0	0		0	0	-	#DIV/0!
1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	236 sarana					236	sarana	236 sarana	100%
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				100	100		0	0	100	#DIV/0!
1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 dok		100	100	100%	1	dok	101 dok	10100%
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				100	100		0	0	100	#DIV/0!
1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	35 dok		100	100	100%	35	dok	135 dok	386%
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				0	0		0	0	-	#DIV/0!
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	75 Unit					75	Unit	75 Unit	100%

1.02.05	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				158	158		0	0	158	#DIV/0!
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten Kota				0	0		0	0	-	#DIV/0!
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	102 dok					102	dok	102 dok	100%
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				158	158		0	0	158	#DIV/0!
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 dok		158	158	100%	2	dok	160 dok	8000%
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0	0	-	#DIV/0!
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							0	0	-	#DIV/0!
2.14.02	1. Program Pengendalian Penduduk				0	0		0	0	-	#DIV/0!
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		dok		0	0		0	dok	-	#DIV/0!
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 dok					1	dok	1 dok	100%
2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	20 dokumen / Sekolah					20	dokumen / Sekolah	20 dokumen / Sekolah	100%
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				0	0		0	0	-	#DIV/0!
2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	5 lap					5	lap	5 lap	100%
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5 dok					5	dok	5 dok	100%
2.14.03	2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				398.25	398		0	0	398	#DIV/0!
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal				175	175		0	0	175	#DIV/0!
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						0	0	-	#DIV/0!
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)						0	0	-	#DIV/0!

2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	25 lap					25	lap	25	lap	100%
2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			75	75	100%	0	0	75	-	#DIV/0!
2.14.03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			100	100	100%	0	0	100	-	#DIV/0!
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				121	121		0	0	121		#DIV/0!
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	121 Orang		121	121	100%	121	Orang	242	Orang	200%
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				100	100		0	0	100		#DIV/0!
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	189 lap		100	100	100%	189	lap	289	lap	153%
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	634 Orang					634	Orang	634	Orang	100%
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	4 Unit					4	Unit	4	Unit	100%
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				2.25	2		0	0	2		#DIV/0!
2.14.03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	33 dok		2.25	2	89%	33	dok	35	dok	106%
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	kampung					0	kampung	-	kampung	#DIV/0!

2.14.04	3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera				0	0		0	0	-	#DIV/0!
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				0	0		0	0	-	#DIV/0!
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Unit					0	Unit	- Unit	#DIV/0!
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	543 Orang					543	Orang	543 Orang	100%
2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	kelompok					0	kelompok	- kelompok	#DIV/0!

Singkawang, 2023
KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA SINGKAWANG

dr Alexander, Sp.PD
NIP. 19711219 200502 1 003

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.

Pada bagian ini menjelaskan tentang analisis terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sesuai Target dan Capaian yang dianalisa pada Tahun 2020, 2021 dan 2022 yang berdasarkan target RENSTRA 2018-2022. Sedangkan untuk tahun 2023 dan 2024 sudah mengacu pada target RENSTRA 2023-2026, yang telah disusun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022, bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam : 1. Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar capaian berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil capaian semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek yaitu : $\text{Capaian} / \text{target} \times 100\%$ 2. Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar capaian berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil capaian semakin baik kinerjanya, gunakan rumus Panjang, yaitu : $\text{Target} - (\text{realisasi} - \text{target}) / \text{Target} \times 100\%$. Untuk pengukuran kinerja 2024 Dinas Kesehatan sudah mengacu pada target yang telah ditetapkan di RENSTRA 2023-2026. Hal ini menandakan bahwa hasil capaian 2022, tidak menjadi dasar mutlak bagi penyajian Renja 2024 yang disusun. Ada sebanyak 69 (enam puluh sembilan) indikator target capaian yang akan dinilai pada tahun 2024 yang bersumber dari Bidang-bidang maupun pemegang program di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Dari data capaian Indikator Sasaran/program yang masuk dalam indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2022 di Kota Singkawang yang menjadi prioritas dan trend berdasarkan tujuan Global maupun regional, dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja sasaran dan program yang telah ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Target SDG'S Capaian Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2030 mencapai 12 per 1000 Kelahiran hidup. Menurut WHO mayoritas dari semua kematian bayi (75%) terjadi selama minggu pertama kehidupan, dan sekitar 1 juta bayi baru lahir meninggal dalam 24 jam pertama. Sehingga kematian bayi merupakan salah satu tolak ukur yang mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu daerah atau wilayah.

Tabel 2.2.1. Realisasi Indikator Angka Kematian Bayi tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022	Kriteria
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7,58	6,00	8,37	139,50	Kurang

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Singkawang, 2022

Tabel diatas menunjukkan target kinerja capaian indikator Angka Kematian Bayi pada tahun 2022 berdasarkan target RPJMD dan target RENSTRA, Dinas Kesehatan dan KB berdasarkan rasio per seribu kelahiran hidup di Kota Singkawang adalah sebesar 7,58 (RPJMD) dan 6 (RENSTRA), sedangkan realisasi capaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan yakni mencapai 8,37. Ada kenaikan sebesar 139,50% angka kematian Bayi di Kota Singkawang. Hal ini menjadi keseriusan bagi jajaran kesehatan untuk lebih meningkatkan upaya-upaya dalam rangka menekan Angka Kematian Bayi diatas.

Adapun penyebab kematian bayi di Kota Singkawang antara lain:

- a. BBLR (8 kasus).
- b. Asfiksia (4 kasus).
- c. Kelainan Kongenital (2 kasus)
- d. Lain-lain (5 kasus)

Alternatif solusi yang dapat dilakukan berdasarkan permasalahan tersebut antara lain:

- a. Melakukan Pelatihan Penatalaksanaan dan penanganan BBLR dan Asfiksia pada tenaga kesehatan.
- b. Melakukan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di tempat atau wilayah yang banyak terdapat kasus penyebab kematian pada bayi.
- c. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat di Posyandu yang tersebar di wilayah kerja Puskesmas di Kota Singkawang.
- d. Melakukan upaya gerak cepat dalam rangka rujukan pada fasilitas kesehatan yang minim sarana prasarana pendukung guna menekan terjadinya kasus kematian bayi.

2. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKB) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah kematian anak-anak di bawah usia lima tahun dalam suatu populasi dan periode waktu tertentu. Angka ini dihitung dengan membagi jumlah kematian balita oleh jumlah kelahiran hidup, lalu hasilnya dikalikan dengan 1.000 untuk menghasilkan angka per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.2.2. Realisasi Indikator Angka Kematian Balita tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022	Kriteria
1	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1,64	0,80	1,49	186,25	Kurang

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Singkawang, 2022

Tabel diatas menunjukkan target kinerja capaian indikator Angka Kematian Balita pada tahun 2022 sebanyak 0,80 dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebanyak 1,49. Angka ini masih jauh dari target Renstra tahun 2022. Selain penyebab kematian Balita yang menaungi juga penyebab kematian bayi seperti yang tertuang di atas, maka ada beberapa penyebab angka kematian balita masih saja menjadi momok diantaranya adalah :

- a. Pneumonia (2 kasus)
- b. Kelalaian keluarga / tenggelam (1 kasus)
- c. Lain-lain (31 kasus)

Alternatif solusi yang dapat dilakukan berdasarkan permasalahan tersebut antara lain:

- a. Melakukan pelayanan deteksi dini pada gangguan pernafasan dan pelatihan bagi petugas kesehatan dalam manajemen penanganan gangguan pernafasan pada Balita.
- b. Melakukan upaya untuk menjaga anak untuk melakukan aktifitas yang aman dan nyaman.
- c. Melakukan simulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak.
- d. Menyiapkan tatalaksana MTBS pada tingkat Puskesmas.

3. Rasio Posyandu Persatuan Balita.

Rasio posyandu persatuan balita adalah jumlah posyandu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jumlah seluruh balita yang ada di wilayah pada tahun yang sama. Posyandu adalah tempat atau aktifitas pemantauan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat dan difasilitasi oleh ptugas kesehatan yang bekerja di wilayah binaannya untuk memantau tumbuh kembang balita.

Tabel 2.2.3. Realisasi Indikator rasio posyandu persatuan balita tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022	Kriteria
1	Rasio posyandu persatuan balita	7,06	10	6,77	67,70	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Singkawang, 2022

Tabel diatas menunjukkan target kinerja capaian indikator rasio posyandu persatuan balita tidak tercapai pada tahun 2022. Realisasi hanya sebesar 6,77 dari target sebesar 10.

Adapun penyebab persentase posyandu persatuan balita tidak mencapai target di Kota Singkawang antara lain:

- a. Rendahnya fasilitas pendukung di posyandu.
- b. Rendahnya dukungan suami atau keluarga lainnya untuk membawa balita ke posyandu.
- c. Kurangnya sosialisasi kembali pasca Covid-19 bahwa posyandu telah aktif.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan berdasarkan permasalahan tersebut antara lain:

- a. Melakukan pengadaan bantuan untuk posyandu melalui dana DAK non fisik.
 - b. Mengajak peran aktif kepala keluarga dalam membawa balitanya ke posyandu.
 - c. Melakukan upaya pemenuhan sarana dan prasarana guna mendukung aktifitas di posyandu.
 - d. Menyediakan media KIE untuk menggerakkan posyandu agar lebih kreatif dan inovatif.
4. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani.

Cakupan komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang dapat mengancam jiwa ibu dan/atau bayi yang ditangani oleh petugas kesehatan. Dihitung dengan estimasi sebesar 20% dari total ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama.

Tabel 2.2.4. Realisasi Indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022	Kriteria
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	59,34	80	52,92	66,19	Kurang

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Singkawang, 2022

Tabel diatas menunjukkan target kinerja capaian indikator cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tidak tercapai pada tahun 2022. Realisasi hanya sebesar 52,92 dari target sebesar 80.

Adapun penyebab cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tidak mencapai target di Kota Singkawang antara lain:

- d. Rendahnya motivasi petugas lapangan untuk mencari target sasaran.
- e. Rendahnya pengetahuan petugas terhadap penanganan komplikasi kebidanan.
- f. Kurangnya pemeliharaan sarana pendukung penanganan komplikasi kebidanan.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan berdasarkan permasalahan tersebut antara lain:

- e. Melakukan penyegaran kepada petugas lapangan terhadap target cakupan.
 - f. Melakukan pelatihan tatalaksana penanganan komplikasi kebidanan.
 - g. Melakukan upaya pemeliharaan dan kalibrasi alat-alat kebidanan di Puskesmas.
5. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja dalam satu tahun tertentu per jumlah seluruh ibu bersalin pada wilayah dan tahun yang sama.

Tabel 2.2.5. Realisasi Indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022	Kriteria
1	cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang	88,59	100	72,45	72,45	Kurang

No	Indikator Kinerja	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022	Kriteria
	memiliki kompetensi kebidanan					

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Singkawang, 2022

Tabel diatas menunjukkan target kinerja capaian indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tidak tercapai pada tahun 2022. Realisasi hanya sebesar 72,45 dari target sebesar 100.

Adapun penyebab cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tidak mencapai target di Kota Singkawang antara lain:

- a. Masih adanya ibu bersalin di tolong selain petugas kesehatan.
- b. Rendahnya responsif petugas terhadap ibu memilih fasyankes yang ada.
- c. Kurangnya kesadaran petugas untuk lebih mempersiapkan sarana kesehatan agar ibu bersalin merasa nyaman untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan berdasarkan permasalahan tersebut antara lain:

- a. Melakukan penyegaran kepada petugas lapangan terhadap target cakupan.
- b. Menyegarkan kembali petugas untuk tatalaksanaan pertolongan persalinan.
- c. Memberikan motifasi bagi petugas dalam rangka upaya pelayanan paripurna bagi ibu bersalin di seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.

6. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak adalah indikator kesehatan masyarakat yang mengukur proporsi anak yang menerima vaksin campak pada usia satu tahun terhadap jumlah total anak usia satu tahun di suatu populasi dan periode waktu tertentu. Konsep ini penting karena vaksin campak adalah langkah krusial dalam menjaga kesehatan anak dan mencegah penyebaran penyakit.

Tabel 2.2.6. Realisasi Indikator Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Persentase Capaian Tahun 2022	Kriteria
1	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	74,4	100,00	35,50	35,50	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Singkawang, 2022

Tabel diatas menunjukkan target kinerja capaian indikator Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak pada tahun 2022 sebanyak 100% dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebanyak 35,50%. Angka ini masih jauh dari target Renstra dan RPJMD tahun 2022.

Adapun penyebab persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak yang rendah di Kota Singkawang antara lain:

- g. Pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap imunisasi campak yang masih rendah.
- h. Kurangnya sarana edukasi bagi masyarakat terhadap dampak dan manfaat dari imunisasi campak.
- i. Inklusifnya sebagian kecil warga terhadap imunisasi.
- j. Kurangnya kesadaran ibu dan kepala keluarga terhadap imunisasi campak.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan berdasarkan permasalahan tersebut antara lain:

- h. Melakukan sosialisasi terus menerus di fasilitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana informasi seperti booklet, leaflet, poster maupun baliho.
 - i. Melakukan advokasi pada perangkat kelurahan, seperti Lurah, Babinsa, Babinkamtibmas, agar ikut bersama-sama meningkatkan cakupan imunisasi terutama imunisasi campak.
 - j. Melakukan pendekatan dan mengajak tokoh agama atau tokoh masyarakat tertentu yang menganggap bahwa imunisasi itu masih tabu.
 - k. Melakukan pendekatan terhadap ibu dan keluarga yang kurang kesadarannya membawa anaknya untuk imunisasi campak.
7. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Tuberkulosis (TBC) BTA (Basil Tahan Asam) merujuk pada sejauh mana program kesehatan mampu menemukan dan mengobati individu yang terinfeksi oleh bakteri TBC dan memiliki hasil positif pada pemeriksaan BTA

Tabel 2.2.4. Realisasi Indikator Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022	Kriteria
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	37,17	90,00	65,50	72,78	Sedang

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Singkawang, 2022

Tabel diatas menunjukkan target kinerja capaian Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA pada tahun 2022 sebanyak 90% dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebanyak 65,50%. Angka ini masih jauh dari target Renstra tahun 2022

Adapun penyebab Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA yang rendah di Kota Singkawang antara lain:

- a. Beban kerja petugas puskesmas yang begitu tinggi
- b. Koordinasi lintas program dan lintas sector masih rendah.
- c. Kurangnya sarana pendukung untuk peningkatan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan berdasarkan permasalahan tersebut antara lain:

- a. Menerapkan dan memprioritaskan penambahan insentif bagi petugas pelacakan dan penanganan penyakit TBC BTA.
- b. Memfokuskan kerjasama lintas sector pada saat pertemuan mini lokakarya semesteran dan triwulanan.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan capaian penemuan penderita penyakit TBC BTA.

7. Cakupan pelayanan anak balita

Cakupan pelayanan anak balita mengacu pada sejauh mana anak-anak balita dalam suatu populasi atau wilayah mendapatkan layanan kesehatan dan perawatan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan optimal mereka. Cakupan ini mencakup berbagai aspek, seperti pelayanan kesehatan, gizi, vaksinasi, pendidikan kesehatan, dan pemantauan pertumbuhan.

Tabel 2.2.7. Realisasi Indikator Cakupan pelayanan anak balita tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022	Kriteria
1	Cakupan pelayanan anak balita	42,53	100,00	22,26	22,26	Kurang

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Singkawang, 2022

Tabel diatas menunjukkan target kinerja capaian Cakupan pelayanan anak balita pada tahun 2022 sebanyak 100% dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebanyak 22,26%. Angka ini masih jauh dari target Renstra tahun 2022

Adapun penyebab Cakupan pelayanan anak balita yang rendah di Kota Singkawang antara lain:

- a. Besarnya target sasaran pada anak balita
- b. Rendahnya aktifitas di posyandu akibat Covid-19
- c. Kurangnya kerjasama antara fasilitas kesehatan yang satu dengan lainnya sehingga gagal dalam pengumpulan data.
- d. Kurangnya insentif tenaga pengumpul data laporan.
- e. Kurangnya kerjasama lintas sektoral dalam menggandeng data balita yang dilayani di fasilitas kesehatan.

Alternatif solusi yang dapat dilakukan berdasarkan permasalahan tersebut antara lain:

- a. Koordinasi dan kolaborasi data sasaran dengan Dinas Kesehatan Propinsi.
 - b. Melakukan kampanye bahwa posyandu sudah mulai aktif kembali.
 - c. Menghitung dan mengalokasikan insentif bagi kader dan petugas kesehatan di posyandu.
 - d. Membentuk tim penanganan data balita, dengan melibatkan sector pelayanan kesehatan milik negeri maupun swasta.
8. Rasio rumah sakit per satuan penduduk
- Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah rumah sakit dalam suatu wilayah tertentu relatif terhadap jumlah penduduknya. Rasio ini memberikan gambaran tentang ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit dalam suatu populasi

Tabel 2.2.8. Realisasi Indikator Rasio rumah sakit per satuan penduduk tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022	Kriteria
1	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,03	0,04	0,02	50,00	Kurang

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Singkawang, 2022

Tabel diatas menunjukkan target kinerja capaian Rasio rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2022 sebanyak 0,04 dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebanyak 0,02.

Adapun penyebab Rasio rumah sakit per satuan penduduk yang rendah di Kota Singkawang antara lain:

- a. Kurangnya investor guna penyediaan sarana Rumah Sakit

Alternatif solusi yang dapat dilakukan berdasarkan permasalahan tersebut antara lain:

- a. Mengundang investor untuk mendirikan RS
- b. Memfasilitasi peningkatan Klinik-klinik swasta untuk menjadi Rumah Sakit.

9. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah ukuran yang mengindikasikan perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah atau negara selama periode tertentu. Laju pertumbuhan ini umumnya diukur dalam bentuk persentase dan menggambarkan sejauh mana populasi suatu wilayah mengalami peningkatan atau penurunan.

Tabel 2.2.9. Realisasi Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022	Kriteria
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,09	2,10	1,61	76,67	Baik

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Singkawang, 2022

Tabel diatas menunjukkan target kinerja capaian Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2022 sebanyak 2,10 dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebanyak 1,61. Angka ini sudah mendekati dari target nasional dan sudah berada diatas target target Renstra tahun 2022 mencapai 2,10.

10. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah anak yang dapat diharapkan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa hidupnya, dengan asumsi bahwa dia mengalami tingkat kesuburan yang diamati pada tahun tertentu. TFR dinyatakan sebagai jumlah rata-rata anak per wanita..

Tabel 2.2.10. Realisasi Indikator Total Fertility Rate (TFR) tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Indikator RPJMD	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Capaian Tahun 2022	Rasio Capaian Tahun 2022	Kriteria
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,26	2,10	2,34	111,43	Baik

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Singkawang, 2022

Tabel diatas menunjukkan target kinerja capaian Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2022 sebanyak 2,10 dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 sebanyak 2,34. Angka ini telah melebihi target Renstra tahun 2022.

Berdasarkan uraian diatas terdapat 8 indikator yang menjadi isu strategis di Kota Singkawang yang cakupannya pada kategori rendah. Sedangkan 2 indikator yang melekat pada program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana pada kategori baik. Tetapi masih jauh dari target nasional dimana LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk dibawah 1,5) dan $TFR < 2$.

Adapun indikator output yang menjadi sasaran yang tertuang pada Renstra 2023-2026 dan menjadi prioritas yang akan dievaluasi selama empat tahun kedepan sesuai dengan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kota Singkawang

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Persentase pemenuhan alat dan sarana prasarana kesehatan.		√	-	80	80	85	85%					
2	Persentase indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kegiatan pelayanan kesehatan pada UKM dan UKP rujukan tingkat Kota.		√	-	85	85	85	85%					
3	Cakupan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	√		79.65	100	100	100	100	18.95		100	100	
4	Cakupan ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	√		76.04	100	100	100	100	19.86		100	100	
5	Cakupan bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	√		75.56	100	100	100	100	21.77		100	100	
6	Cakupan balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	√		37.75	100	100	100	100	11.29		100	100	
7	Cakupan usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	√		48.56	100	100	100	100	20.27		100	100	
8	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar.	√		53.65	100	100	100	100	1.79		100	100	
9	Cakupan usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	√		40.88	100	100	100	100	11.76		100	100	
10	Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	√		30.71	100	100	100	100	0.67		100	100	
11	Cakupan penderita diabetes mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	√		69.68	100	100	100	100	3.35		100	100	
12	Cakupan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	√		67.18	100	100	100	100	23.79		100	100	
13	Cakupan orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar.	√		93.52	100	100	100	100	20.41		100	100	
14	Cakupan penemuan dan pengobatan TBC		√		90	90	90	90					
15	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC		√		90	90	90	90					
16	Cakupan orang terduga menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai standar.	√		79.94	100	100	100	100	19.95		100	100	
17	Persentase ODHA mendapat ART		√		90	90	90	90					
18	Persentase ODHA ARV dengan Viral Load tersupresi		√		90	90	90	90					
19	Persentase pemenuhan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi.		√		80	85	90	90					
20	Persentase pengendalian dan pengawasan penerbitan izin RS kelas C,D dan fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kota Singkawang		√		90	90	90	90					
21	Persentase penyediaan SDM di Fasilitas Pelayanan Kota Singkawang		√		100	100	100	100					
22	Persentase pelaksanaan pengembangan Mutu dan Peningkatan Kopetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota Singkawang		√		100	100	100	100					
23	Persentase pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT sesuai standar perizinan dalam setahun.		√		85	90	90	95					
24	Persentase pengawasan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga sesuai standar dalam 1 tahun		√		100	100	100	100					
25	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan Restoran dan Depot Air Minum (DAM) di Kota Singkawang		√		100	100	100	100					
26	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga di Kota Singkawang.		√		100	100	100	100					
27	Penilaian PNPRB.		√		BB	BB	A-	A-					
28	Persentase kebijakan publik berwawasan kesehatan		√		80	80	80	80					
29	Persentase Rumah Sehat.		√		85	85	85	85					
30	Persentase Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri		√		85	85	85	85					
31	Persentase balita gizi kurang (BB/TB)		√		4.4	4.3	4.2	4.1					
32	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan.		√		100	100	100	100					
33	Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif.		√		50	55	60	65					
34	Persentase Puskesmas yang melaksanakan surveilans gizi.		√		100	100	100	100					

35	Prevalensi balita stunting		√		12	11.5	11.5	10.5					
36	Persentase Keluruhan Stop Buang Air Besar Sembarangan.		√		70	90	95	100					
37	Persentase Sarana Air Minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minum sesuai standar.		√		72	76	80	85					
38	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan (RS,Klinik, PKM) yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar.		√		72	76	80	85					
39	Persentase tempat pengelolaan pangan (TPP) yang memenuhi syarat kesehatan		√		56	62	74	80					
40	Persentase tempat dan fasilitas umum (tfu) yang melakukan pengawasan sesuai standar.		√		70	75	80	80					
41	Penemuan Kasus Non Polio AFP pada penduduk usia < 15 tahun.		√		3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus					
42	Penemuan kasus Discarded campak		√		10	10	10	10					
43	Persentase Kejadian Luar Biasa yang ditangani		√		100	100	100	100					
44	Persentase bayi usia 0 - 11 Bulan yang mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap.		√		93	95	100	100					
45	Persentase bayi usia 0 - 11 Antigen Baru		√		93	95	100	100					
46	Persentase Imunisasi Dasar Lengkap pada anak usia 12 -23 Bulan.		√		75	80	85	90					
47	Persentase anak usia 12 - 24 Bulan yang mendapatkan imunisasi lanjutan /Baduta.		√		93	95	100	100					
48	Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan Lengkap di Usia Sekolah Dasar		√		75	80	85	90					
49	Persentase Wanita Usia Subur yang memiliki status Imunisasi TT2+ WUS		√		70	80	90	95					
50	Persentase pembinaan masa keberangkatan jamaah haji		√		100	100	100	100					
51	Angka kesakitan (Incidence Rate atau Annual Parasite Incidence/API) Malaria per 1.000 penduduk.		√		<1	<1	<1	<1					
52	Angka kesakitan (Incidence Rate = IR) DBD per 100.000 penduduk.		√		<49	<49	<49	<49					
53	Persentase penemuan pneumonia pada balita berdasarkan perkiraan kasus (incidence rate) pneumonia pada balita.		√		75	80	85	90					
54	Persentase penemuan penderita diare dari perkiraan kasus (incidence rate) penyakit diare.		√		100	100	100	100					
55	Persentase deteksi dini Hepatitis B pada ibu hamil.		√		100	100	100	100					
56	Persentase penemuan kasus baru Kusta dari perkiraan kasus (incidence rate).		√		100	100	100	100					
57	Persentase Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) yang berindikasi mendapat Vaksin Anti Rabies (VAR).		√		100	100	100	100					
58	Persentase jumlah penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM prioritas		√		70	90	90	95					
59	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian terpadu PTM (Pandu PTM)		√		100	100	100	100					
60	Persentase populasi penduduk wanita kelompok usia 30 – 50 tahun yang dilakukan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim.		√		80	80	80	80					
61	Persentase kelurahan yang menerapkan kawasan tanpa rokok pada 7 tatanan KTR.		√		5/26 (19.2)	7/26 (26.9)	9/26 (34.6)	13/26 (50)					
62	Persentase Puskesmas menyelenggarakan Upaya Berhenti Merokok (UBM).		√		20	30	40	50					
63	Persentase kelurahan melaksanakan deteksi dini gangguan indera		√		40	50	60	70					
64	Persentase penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di puskesmas/FKTP		√		63	90	90	95					
65	Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP		√		58	90	90	95					
66	Persentase jumlah penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM prioritas		√		58	90	90	95					
67	TFR (Total Fertility Rate) Kota Singkawang < 2%.		√		2.57	2.56	2.55	2.54					
68	Persentase Pembinaan Program Keluarga Berencana (KB)		√		80	85	90	100					
69	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga sejahtera		√		80	85	90	100					

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Penyediaan akses pelayanan kesehatan yang masih rendah khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, merupakan salah satu masalah yang harus diatasi oleh seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat khususnya Kota Singkawang, untuk itu peran penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Salah satu bentuk tugas yang diemban oleh pemerintah adalah memastikan layanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang ada di wilayahnya berjalan secara maksimal dengan mengedepankan upaya peningkatan mutu, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik, yang telah dilaksanakan dengan sinergisitas antara Pusat, Provinsi dan Kota Singkawang. Hal ini tentunya berdampak luas dalam upaya pemenuhan akses pelayanan kesehatan di Kota Singkawang, sehingga sarana dan prasarana fasilitas kesehatan primer sudah memadai dan dapat meningkatkan kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas, baik rawat jalan maupun rawat inap.

Permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang adalah lebih kepada terbatasnya Sumber Daya Manusia kesehatan sebagai modal dasar pembangunan kesehatan itu sendiri. Pembangunan manusia dapat dinilai dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek kesehatan yang secara umum turut memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas. Indikator yang banyak digunakan dalam mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* yang merupakan indeks komposit yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli. Dimana IPM Kota Singkawang pada tahun 2022 adalah sebesar 72,89%, lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM Nasional mencapai 72,91%.

Sehubungan berakhirnya kepemimpinan Walikota Singkawang periode 2018-2022, maka, Sasaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana mengacu pada RPJPD Kota Singkawang yang masuk pada masa akhir dari RPJPD dengan visi “Singkawang Maju, Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agroindustri”. Dalam upaya mencapai visi diatas maka misi utama Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat dan produktif. Untuk

mendapatkan manusia yang produktif harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan. Hal ini yang menjadi fokus pimpinan sehingga akan berimplikasi pada harapan yang tertuang dalam SDG's dimana masyarakat dijamin berkehidupan yang sehat dan mensejahterakan bagi semua penduduk yang hidup dan berusaha di Kota Singkawang.

Tantangan berupa ketersediaan akses pelayanan kesehatan yang masih rendah, sementara akses geografis Kota Singkawang yang bisa dilalui oleh Negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan SDM kesehatan yang handal, juga terbatas menjadikan peluang bagi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana untuk mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk SDM Kesehatannya kearah yang lebih bermutu dan kompeten.

Menghadapi persoalan diatas, untuk itu Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana telah menetapkan 5 sasaran strategis untuk menjawab tantangan tahun depan diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan lanjutan, menuju pelayanan kesehatan yang bermutu dan berorientasi pada reformasi birokrasi dengan mengedepankan peningkatan pelayanan publik dan ketersediaan obat, sarana prasarana pendukung layanan kesehatan yang paripurna.
2. Meningkatkan Gerakan Masyarakat hidup Sehat, dengan melibatkan Peran Serta Masyarakat dalam bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat. (UKBM).
3. Meningkatkan kesehatan keluarga, termasuk kesehatan ibu, anak, dan anggota keluarga, sehingga upaya peningkatan pemenuhan gizi pada masyarakat dapat terpenuhi.
4. Menekan angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit menular dan tidak menular, serta upaya penyehatan lingkungan.
5. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Definisi RKPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan

berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rancangan awal RKPD yang disusun oleh Bappeda, dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lainnya dengan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.

Ada beberapa indikator yang tidak termasuk ke dalam RKPD yang disusun diantaranya terkait dengan AIDS, Tuberculosis, dan Malaria (ATM). Program yang secara khusus oleh ADINKES (Asosiasi Dinas Kesehatan), disosialisasikan dan sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang menguatkan bahwa sub kegiatan terkait ATM sudah diakomodir dan difasilitasi pada regulasi tersebut, dapat dilihat pada tabel T-C.31 berikut,

Tabel T-C.31.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
Kota Singkawang

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana					231,322,733,191						251,070,733,191	
					228,930,372,191						247,613,416,536	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					228,930,372,191						247,613,416,536	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Singkawang	Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam 1 Tahun	100%	190,039,655,066	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Singkawang	Persentase pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam 1 Tahun	100%	193,803,210,495		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun dan valid dalam 1 Tahun	4 dok	57,997,850	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun dan valid dalam 1 Tahun	4 dok	63,000,000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah ASN yang mendapat penyediaan gaji dan tunjangan dalam 1 Tahun	560 orang	82,349,322,871	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah ASN yang mendapat penyediaan gaji dan tunjangan dalam 1 Tahun	560 orang	82,349,322,871	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun dan valid dalam 1 Tahun	2 dok	17,500,000	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang tersusun dan valid dalam 1 Tahun	2 dok	17,500,000	
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Persentase dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dan RSUD	100%	25,000,000	4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Persentase dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dan RSUD	100%	25,000,000	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dok	125,700,000	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dok	275,700,000	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dalam 1 Tahun	1 paket	327,000,000	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan dalam 1 Tahun	1 paket	633,000,000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dalam 1 Tahun	39 Bangunan	5,823,269,552	6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dalam 1 Tahun	39 Bangunan	6,691,962,454	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dalam 1 Tahun	28 Unit	213,952,863	7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Singkawang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dalam 1 Tahun	28 Unit	947,725,170	
9	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Singkawang	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan BLUD	10 Puskesmas	101,099,911,930	8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Kota Singkawang	Jumlah Puskesmas Yang Melaksanakan BLUD	10 Puskesmas	102,800,000,000	

2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan masyarakat	80%	37,531,434,425,000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Pelayanan Kesehatan masyarakat	80%	51,593,541,441			
	9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase pemenuhan alat dan sarana prasarana kesehatan	80%	12,905,391,375	9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase pemenuhan alat dan sarana prasarana kesehatan	80%	17,967,307,761		
	10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap kegiatan pelayanan kesehatan pada UKM dan UKP rujukan tingkat Kota	85%	24,299,043,050	10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap kegiatan pelayanan kesehatan pada UKM dan UKP rujukan tingkat Kota	85%	33,508,233,680		
			Kota Singkawang	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	349,000,000				Kota Singkawang	Persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	344,671,000	
			Kota Singkawang	persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	415,000,000				Kota Singkawang	persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	191,550,000	
			Kota Singkawang	persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	290,000,000				Kota Singkawang	persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	337,200,000	
			Kota Singkawang	persentase balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	475,000,000				Kota Singkawang	persentase balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	287,800,000	
			Kota Singkawang	Persentase usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	485,000,000				Kota Singkawang	Persentase usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	314,250,000	
			Kota Singkawang	persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100%	370,200,000				Kota Singkawang	persentase usia produktif mendapat pelayanan kesehatan	100%	330,730,000	
			Kota Singkawang	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	395,000,000				Kota Singkawang	Persentase usia lanjut mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	284,500,000	
			Kota Singkawang	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	170,200,000				Kota Singkawang	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	30,000,000	
			Kota Singkawang	persentase penderita diabetes mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	375,200,000				Kota Singkawang	persentase penderita diabetes mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	30,000,000	
			Kota Singkawang	persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	292,400,000				Kota Singkawang	persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	76,540,000	
			Kota Singkawang	Persentase orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar.	100%	679,830,000				Kota Singkawang	Persentase orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar.	100%	241,547,880	
			Kota Singkawang	persentase orang terduga menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar.	100%	141,200,000				Kota Singkawang	persentase orang terduga menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar.	100%	164,000,000	

			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	409,685,300			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	75,000,000	
			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen				Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen	1,200,000	
			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1,215,000,000			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	1,733,800,000	
			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen				Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1,200,000	
			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	153,634,200			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen	330,000,000	
			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dokumen	30,000,000			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dokumen	50,000,000	
			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	65,091,200			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen	407,900,000	
			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	14,520,200							
			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	268,032,900			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen	497,300,000	
			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	2,340,000,000			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	25,375,136,800	
			Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1 Orang				Kota Singkawang	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1 Orang	1,200,000	
			Kota Singkawang	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket				Kota Singkawang	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	47,000,000	

			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	84,800,000			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	1,000,000	
			Kota Singkawang	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	10 Unit	50,000,000			Kota Singkawang	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	10 Unit	10,000,000	
			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen	14,603,249,250			Kota Singkawang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen	1,000,000,000	
			Kota Singkawang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	9 Unit	300,000,000			Kota Singkawang	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	9 Unit	600,000,000	
			Kota Singkawang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	10 Unit				Kota Singkawang	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	10 Unit	250,000,000	
			Kota Singkawang	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	125 Keluarga				Kota Singkawang	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	125 Keluarga	15,000,000	
			Kota Singkawang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1018 Orang				Kota Singkawang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1018 Orang	201,163,000	
			Kota Singkawang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	390 Orang				Kota Singkawang	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	390 Orang	65,000,000	
			Kota Singkawang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang				Kota Singkawang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang	113,545,000	
			Kota Singkawang	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2 Tatanan				Kota Singkawang	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2 Tatanan	100,000,000	
	11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kota Singkawang	Persentase pemenuhan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	85%	195,000,000	11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kota Singkawang	Persentase pemenuhan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	85%	56,000,000	
	12	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase pengendalian dan pengawasan penerbitan izin RS kelas C,D dan fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kota Singkawang	90%	132,000,000	12	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase pengendalian dan pengawasan penerbitan izin RS kelas C,D dan fasilitas Kesehatan Tingkat Daerah Kota Singkawang	90%	62,000,000	

3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100%	860,000,000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	100%	901,000,000	
	13	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase penyediaan SDM di Fasilitas Pelayanan Kota Singkawang	100%	460,000,000	13	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase penyediaan SDM di Fasilitas Pelayanan Kota Singkawang	100%	51,000,000
	14	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase pelaksanaan pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota Singkawang	100%	400,000,000	14	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase pelaksanaan pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota Singkawang	100%	850,000,000
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang menerapkan Manajemen sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar	90%	92,805,900	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		Persentase Instalasi Farmasi Kota Singkawang menerapkan Manajemen sediaan Farmasi dan Makanan Minuman sesuai Standar	90%	449,445,000	
	15	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Singkawang	Persentase pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT sesuai standar perizinan dalam setahun	90%	38,000,000	15	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Singkawang	Persentase pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT sesuai standar perizinan dalam setahun	90%	78,445,000
	16	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Singkawang	Persentase pengawasan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga sesuai standar dalam 1 tahun	100%	20,000,000	16	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Singkawang	Persentase pengawasan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga sesuai standar dalam 1 tahun	100%	140,000,000
	17	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Singkawang	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) di Kota Singkawang	100%	9,805,900	17	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Singkawang	Persentase Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) di Kota Singkawang	100%	50,000,000
	18	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Singkawang	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga di Kota Singkawang.	100%	25,000,000	18	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Kota Singkawang	Persentase Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga di Kota Singkawang.	100%	181,000,000

5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kota Singkawang	85%	406,476,800		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kota Singkawang	85%	866,219,600	
	19	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase kebijakan publik berwawasan Kesehatan	80	152,236,800	19	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase kebijakan publik berwawasan Kesehatan	80	114,457,600	
	20	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase Rumah Sehat	85%	200,000,000	20	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase Rumah Sehat	85%	1,000,000	
	21	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	85%	54,240,000	21	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang	Persentase Kelurahan siaga aktif purnama dan mandiri	85%	750,762,000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,392,361,000	3,457,316,655						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						2,392,361,000	3,457,316,655						
6	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Kota Singkawang	TFR (Total Fertility Rate)Kota Singkawang < 2%.	2.56%	175,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Kota Singkawang	TFR (Total Fertility Rate)Kota Singkawang < 2%.	2.56%	172,600,000	
	22	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Singkawang	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	85%	175,000,000	22	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Singkawang	Persentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	85%	40,000,000	
	23	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang				23	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang			132,600,000	
7	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Persentase Pembinaan Program Keluarga Berencana (KB)	85%	1,177,361,000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			Persentase Pembinaan Program Keluarga Berencana (KB)	85%	2,417,116,655	
	24	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Singkawang			1,177,361,000	24	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Singkawang			645,736,655	
	25	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Singkawang				25	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Singkawang			79,430,000	
	26	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang				26	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Singkawang			1,430,450,000	

	27	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Singkawang				27	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Singkawang			261,500,000	
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	85%	1,040,000,000		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	85%	867,600,000	
	28	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Singkawang			1,040,000,000	28	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Singkawang			867,600,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan bersumber masyarakat dapat dihasilkan dari pertemuan tahunan atau lebih dikenal dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada awal tahun, untuk tahun berikutnya yang dalam hal ini tahun 2024. Biasanya Musrenbang di tingkat Kecamatan mengundang para OPD, dan anggota dewan yang nantinya dapat menampung aspirasi yang bersumber dari masyarakat dan dikalkulasikan serta dirembukkan bersama-sama untuk mendapatkan jumlah usulan kegiatan berdasarkan kewenangannya.

Hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut akan dilakukan rumusan-rumusan program prioritas, sekaligus melakukan kompilasi dan sinergisitas dengan perangkat daerah terkait, dengan harapan dokumen perencanaan dari hasil musrenbang mencerminkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi kebutuhan masyarakat atau para pemangku kepentingan. Usulan bersumber dari Musrenbang dapat dilihat pada tabel T-C.32 sebagai berikut :

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kota Singkawang

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

No	Program/Kegiatan	Lokasi		Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Bantuan Posyandu	NEK CATENG RT 002 RW 001, Kota Singkawang	Pangmilang		1 paket	TAK ADANYA BANGUNAN POSYANDU. SETIAP KEGIATAN POSYANDU MEMINJAM TEMPAT DI RUMAH WARGA
2	Bantuan Posyandu	NEK CATENG RT 002 RW 001, Kota Singkawang	Pangmilang		1 paket	TIDAK TERSEDIA BANGUNAN POSYANDU DI RT 001,002,003 DAN 008. SETIAP KEGIATAN POSYANDU MEMINJAM HALAMAN WARGA
3	Bantuan Posyandu	NEK CATENG RT 002 RW 001, Kota Singkawang	Pangmilang		1 paket	TIDAK ADANYA BANGUNAN POSYANDU DI RT 001,002,003 DAN 008, APABILA KEGIATAN POSYANDU MINJAM HALAMAN WARGA
4	Pelayanan Kesehatan	RT.07 dan RT.10 Kelurahan Sagatani (Posyandu), Kota Singkawang	Roban		1 paket	tidak tersedia
5	Pelayanan dan Penyuluhan KB	KELURAHAN PANGMILANG, Kota Singkawang	Pangmilang		1 paket	PEMBINAAN BINA KELUARGA BALITA, REMAJA DAN LANSIA
6	Pelayanan Kesehatan	KELURAHAN PANGMILANG RT 001 SAMPAL RT 022, Kota Singkawang	Pangmilang		1 paket	SARANA PRASARANA POSYANDU
7	Bantuan Posyandu	RT.01 Kel. Nyarumkop, Kota Singkawang	Nyarumkop		1 paket	Rehab Posyandu Kembang Juang (Jendela, Atap) untuk meningkatkan pelayanan posyandu
8	Bantuan Posyandu	RT.06 Kel. Nyarumkop, Kota Singkawang	Nyarumkop		1 paket	Rehab Posyandu Pendarang Indah untuk meningkatkan pelayanan posyandu
9	Bantuan Posyandu	Posyandu Kembang Dahlia RT.07 Kel. Nyarumkop, Kota Singkawang	Nyarumkop		1 paket	Rehab Posyandu Kembang Dahlia dan Perlengkapan Posyandu (Timbangan dll) untuk meningkatkan pelayanan posyandu
10	Bantuan Posyandu	RT.02 Kel. Nyarumkop, Kota Singkawang	Nyarumkop		1 paket	Seragam dan Perlengkapan Meja (muebeler) Kader Posyandu untuk meningkatkan pelayanan posyandu
11	Bantuan Posyandu	posyandu lansia Nusa Indah RT.04 Kel. Nyarumkop, Kota Singkawang	Nyarumkop		1 paket	Bantuan untuk posyandu lansia Nusa Indah Bantuan berupa makanan, susu dll diharapkan dapat membantu para lansia
12	Bantuan Posyandu	RT.07 dan RT.10, Kota Singkawang	Sगतani		1 paket	tidak tersedia / belum ada posyandu
13	Bantuan Posyandu	Kel.Sijangkung, Kota Singkawang	Sijangkung		1 paket	perlu pembentukan Posyandu, Kader dan penambahan sarana & Prasarana Posyandu
14	Pelayanan dan Penyuluhan KB	Jl. Trisula, Kota Singkawang	Naram		1 paket	Bangunan sudah tidak layak untuk digunakan
15	Pelayanan Kesehatan	Kelurahan Kuala, Kota Singkawang	Kuala		1 paket	Kurangnya Fasilitas Pelayanan Posyandu Balita dan Manula (Speaker Portabel 12 Inchi)
16	Pelayanan Kesehatan	Kelurahan Kuala, Kota Singkawang	Kuala		1 paket	Fasilitas pendukung kegiatan 6 Posyandu Kelurahan Kuala (Tikar/matras puzzle (6 Set)
17	Bantuan Posyandu	Posyandu Kelurahan Bukit Batu, Kota Singkawang	Bukit Batu		1 paket	tidak ada Timbangan digital bayi dan dewasa
18	Pelayanan dan Penyuluhan KB	Kelurahan Sungai Garam Hilir , Kota Singkawang	Sungai Garam Hilir		1 paket	Penyusunan Stunting di Posyandu Untuk memberikan Pengetahuan bagi orang tua dan petugas Posyandu memberikan makanan bergizi kepada anak-anak generasi penerus, (wulan Tahun 2022-2023 (Prioritas 5 Bidang Sosial Budaya)
19	Bantuan Posyandu	Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang	Sekip Lama		1 paket	Perbaikan gizi untuk bumil dan anak stunting

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan Renja terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Demikian halnya dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yang menempatkan RPJMN tahun 2020-2024 sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD, sekaligus RPJMD maupun RENSTRA OPD sebagai instrumen penjabaran program dan kegiatan pada OPD. Analisa atau telaah terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Sasaran pembangunan kesehatan pada RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan. RPJMN 2020-2040 telah menentukan strateginya yang terurai pada lima point sebagai berikut:

1. Peningkatan kesehatan Ibu dan anak dan kesehatan reproduksi ;
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat;
3. Peningkatan Pengendalian Penyakit;
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.

Dalam upaya mendukung kebijakan Nasional diatas, maka telah disusun kebijakan di tingkat Kota Singkawang dengan membentuk bidang-bidang pengampuh. Dimana dalam upaya Peningkatan kesehatan Ibu dan anak dan kesehatan reproduksi, Percepatan perbaikan gizi masyarakat dikelola oleh bidang Kesehatan Masyarakat dan berkolaborasi dengan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk strategi Peningkatan Pengendalian Penyakit, Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, dibawah naungan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

Permasalahan kesehatan yang muncul di Provinsi Kalimantan Barat diantaranya yaitu:

1. Masih rendahnya status kesehatan Ibu dan Anak;
2. Masih rendahnya status gizi masyarakat;
3. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit;
4. Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas;
5. Masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat;
6. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal;
7. Belum efektifnya manajemen pembangunan kesehatan belum efektif;
8. Masih lebarnya kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah;
9. Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah; dan
10. Masih belum memadai sarana dan prasarana kesehatan.

Sebagai wujud dalam ikut serta mengatasi masalah regional Kalimantan Barat diatas, maka Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang berperan aktif dalam hal Mengatasi yang menjadi bagian dari masalah Dinas Kesehatan Provinsi, dan tentunya ikut eksis menjaga kawasan yang menjadi tanggungjawab kewilayahan pada bagian Kalimantan Barat bagian Utara, yang begitu rentan terhadap akses penyebaran penyakit antar negara, maupun antar Kabupaten.

Selain itu permasalahan pembiayaan yang juga menjadi strategi penanganan di Kalimantan Barat, maka Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang telah berupaya mengeluarkan kebijakan *Universal Health Coverage (UHC)*, yang berupaya menanggung warga Kota Singkawang terutama pada pembebasan biaya pembiayaan kesehatan, maupun kesenjangan wilayah yang menjadi permasalahan di tingkat Provinsi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Pada dokumen RENSTRA Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang tahun 2023-2026 disebutkan bahwa derajat kesehatan masyarakat merupakan tolak ukur yang digunakan dalam pencapaian keberhasilan program dengan berbagai upaya yang berkesinambungan. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah salah satu tujuan dalam RPJMD Kota Singkawang, yang merupakan bagian dalam RPJPD kota Singkawang Tahun 2005-2025. Demikian pula halnya tujuan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tidak terlepas dari RPJPD Kota Singkawang, yaitu meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk. Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan dua sasaran utama yaitu : (1). Meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan (2). Menekan laju Pertumbuhan Penduduk. Agar tujuan dan sasaran utama maka ditetapkan kembali 5 langkah strategis pada 4 tahun kedepan diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan lanjutan, menuju pelayanan kesehatan yang bermutu dan berorientasi pada reformasi birokrasi dengan mengedepankan peningkatan pelayanan publik dan ketersediaan obat, sarana prasarana pendukung layanan kesehatan yang paripurna.
2. Meningkatkan Gerakan Masyarakat hidup Sehat, dengan melibatkan Peran Serta Masyarakat dalam bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat. (UKBM). Diharapkan terwujud kemandirian masyarakat terhadap status kesehatannya.
3. Meningkatkan kesehatan keluarga, termasuk kesehatan ibu, anak, dan anggota keluarga lainnya.
4. Menekan angka morbiditas dan mortalitas akibat penyakit menular dan tidak menular, serta upaya penyehatan lingkungan.
5. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.

Tujuan dan sasaran renja tahun 2024 merupakan bagian rencana strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang yang akan dicapai secara berkala oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek yaitu pada Rencana Kerja 2024.

3.3 Program dan Kegiatan.

- A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan kesehatan yang *sustainable* atau berkelanjutan, dimana Indonesia merupakan bagian dari dunia, yang berkeinginan untuk berperan dalam mengatasi masalah kesehatan global, sehingga acuan dari program dan kegiatan juga bermuara kepada SDG's (*Sustainable Development Goal's*). Program yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan SDG's yakni (1) memastikan seluruh masyarakat untuk hidup sehat. (2). Mendukung kesejahteraan bagi semua usia, dan (3). Meningkatkan pelayanan kesehatan. Program ini sejalan dengan kegiatan yang disusun dalam RENSTRA Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang tahun 2023-2026.

Adapun program dan kegiatan yang tertuang dalam unit organisasi Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, diuraikan dengan kegiatan sebagai berikut :
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Peningkatan Pelayanan BLUD.
- b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, diuraikan dengan kegiatan sebagai berikut :
- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, diuraikan dengan kegiatan sebagai berikut :
- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, diuraikan kegiatan sebagai berikut :
- Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
- e. Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan, diuraikan kegiatan sebagai berikut :
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten Kota
 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

- f. Program Pengendalian Penduduk., diuraikan kegiatan sebagai berikut :
- Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), diuraikan kegiatan sebagai berikut:
- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
- h. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), diuraikan kegiatan sebagai berikut :
- Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

B. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
Rekapitulasi program dan kegiatan dalam upaya menunjang tujuan dan sasaran dari Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang pada Rencana Kerja Tahun 2024 terdapat 8 Program, 30 Kegiatan dan 110 Sub Kegiatan
Sifat penyebaran program dan kegiatan di Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tersebar di 5 Kecamatan dan 26 Kelurahan. Enam (6) fasilitas Rumah Sakit Umum maupun Khusus. Sepuluh (10) Puskesmas yang melaksanakan UKP (Upaya Kesehatan Perorangan dan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat).

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Kota Singkawang
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja
1					2	3	4
					DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Laporan
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		912 Orang/bulan
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		550 Dokumen
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan
1	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		3 Dokumen
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
1	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen
1	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		6 Laporan
1	02	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen
1	02	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		
1	02	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah		
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Dokumen
1	02	01	2.04	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		
					Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		1 Dokumen
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		100 Dokumen
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		100 Dokumen
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		200 Orang
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit
1	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel		
						Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 Unit Kerja
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		
1	02	02	201		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
1	02	02	201	05	Pengembangan Rumah Sakit		
						Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit
1	02	02	201	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2 Unit
1	02	02	201	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Unit
1	02	02	201	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	2 Unit
1	02	02	201	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		

						Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit
1	02	02	201	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	166 Unit
1	02	02	201	16	Pengadaan Obat, Vaksin		
						Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket
1	02	02	201	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai		
						Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket
1	02	02	201	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	50 Unit
1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
1	02	02	202	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4527 Orang
1	02	02	202	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4321 Orang
1	02	02	202	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4115 Orang
1	02	02	202	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		
						Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19792 Orang
1	02	02	202	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35794 Orang
1	02	02	202	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
						Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	148497 Orang
1	02	02	202	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut		
						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28879 Orang
1	02	02	202	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76165 Orang
1	02	02	202	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6297 Orang
1	02	02	202	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat		
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	496 Orang
1	02	02	202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5494 Orang
1	02	02	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV		
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6603 Orang
1	02	02	202	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen
1	02	02	202	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dokumen
1	02	02	202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen
1	02	02	202	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen
1	02	02	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5 Dokumen

1	02	02	202	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dokumen
1	02	02	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	5 Dokumen
1	02	02	202	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	10 Dokumen
1	02	02	202	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen
1	02	02	202	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1 Orang
1	02	02	202	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket
1	02	02	202	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen
1	02	02	202	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	10 Unit
1	02	02	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	10 Dokumen
1	02	02	202	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	9 Unit
1	02	02	202	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	10 Unit
1	02	02	202	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	125 Keluarga
1	02	02	202	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1018 Orang
1	02	02	202	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	390 Orang
1	02	02	202	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	100 Orang
1	02	02	202	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	2 Tatanan
1	02	02	203		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		
1	02	02	203	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dokumen
1	02	02	203	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	11 Dokumen
1	02	02	203	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	1 Unit
1	02	02	204		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		

1	02	02	204	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	31 Unit
1	02	02	204	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	10 Unit
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		
1	02	03	202		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah		
1	02	03	202	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen
1	02	03	202	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	2 Orang
1	02	03	203		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah		
1	02	03	203	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 Orang
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
1	02	04	201		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		
1	02	04	201	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen
1	02	04	201	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Sarana
1	02	04	201	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	2 Sarana
1	02	04	203		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk		
1	02	04	203	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2 Dokumen
1	02	04	204		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah		
1	02	04	204	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen
1	02	04	206		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri		
1	02	04	206	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	90 Unit
1	02	04	206	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Dokumen
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		
1	02	05	201		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah		
1	02	05	201	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2 Dokumen

1	02	05	202		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
1	02	05	202	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	
1	02	05	203		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
1	02	05	203	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		
2	14	02	201		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam		
2	14	02	201	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota		
					Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
2	14	02	201	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal		
					Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	7 Dokumen	
2	14	02	202		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
2	14	02	202	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	5 Laporan	
2	14	02	202	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5 Dokumen	
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		
2	14	03	201		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya		
2	14	03	201	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	5 Organisasi	
2	14	03	201	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK		
					Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Unit	
2	14	03	201	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi		
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	5 Laporan	
2	14	03	201	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK		
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	5 Laporan	
2	14	03	201	08	Pengendalian Program KKBPK		
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	5 Laporan	
2	14	03	202		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		
2	14	03	202	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	26 Orang	
2	14	03	203		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah		
2	14	03	203	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan		
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	36 Laporan	
2	14	03	203	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5 Orang	
2	14	03	203	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB		
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	5 Unit	
2	14	03	204		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam		
2	14	03	204	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		

						Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	5 Dokumen
2	14	03	204	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB		
						Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	5 Kampung
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		
2	14	04	201		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
2	14	04	201	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan		
						Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Unit
2	14	04	201	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,		
						Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Orang
2	14	04	201	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-		
						Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3 Kelompok

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Rencana Kerja terdiri dari program yaitu penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan sampai pada sub kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025. Penyajian program dan kegiatan sampai pada sub kegiatan dilakukan berdasarkan RENSTRA tahun 2023-2026 dan RKPD tahun 2024 yang sudah ditetapkan. Sasaran berdasarkan RPD Kota Singkawang 2023-2026 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan menjadi tujuan dari capaian Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, sementara sasarannya yakni meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada UKP dan UKM serta menurunkan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mencapai sasaran tersebut, program prioritas Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tahun 2024 didukung oleh 1 program penunjang 7 Program wajib sehingga jumlahnya 8 program, 28 Kegiatan dan 108 sub kegiatan pendukung untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana selama satu tahun.

Untuk pagu pendanaan dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut :

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Singkawang
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
			DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA						251,045,733,191	251,729,111,220	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						247,588,416,536	248,255,611,220	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						247,588,416,536	248,255,611,220	
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						193,778,210,495	193,928,808,391	
1	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						63,000,000	65,000,000
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	18,000,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	6 Dokumen	18,000,000
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	15,000,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	2 Laporan	15,000,000
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	30,000,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	4 Laporan	32,000,000
1	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						82,349,322,871	82,349,322,871
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	912 Orang/bulan	81,940,668,871	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	912 Orang/bulan	81,940,668,871
1	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	343,654,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	343,654,000

						Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1,500,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Unit	750,000,000			
1	02	02	201	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas											
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	8,500,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2 Unit	8,500,000,000			
1	02	02	201	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya											
						Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	600,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		4 Unit	650,000,000			
1	02	02	201	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	225,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2 Unit	450,000,000			
1	02	02	201	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
						Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	1,200,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2 Unit	1,200,000,000			
1	02	02	201	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	166 Unit	1,842,307,761	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		166 Unit	2,042,307,761			
1	02	02	201	16	Pengadaan Obat, Vaksin											
						Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	1,000,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Paket	1,000,000,000			
1	02	02	201	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai											
						Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	2,800,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		1 Paket	2,800,000,000			
1	02	02	201	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit	300,000,000	Pendapatan dari BLUD		50 Unit	300,000,000			

1	02	02	202		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			33,508,233,680					34,151,592,468
1	02	02	202	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4527 Orang	344,671,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		4527 Orang		344,671,000
1	02	02	202	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4321 Orang	191,550,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		4321 Orang		191,550,000
1	02	02	202	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4115 Orang	337,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		4115 Orang		337,200,000
1	02	02	202	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita								
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19792 Orang	287,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		19792 Orang		287,800,000
1	02	02	202	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar								
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35794 Orang	314,250,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		35794 Orang		314,250,000
1	02	02	202	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif								
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	148497 Orang	330,730,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		148497 Orang		342,000,000
1	02	02	202	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut								

						Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	28879 Orang	284,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		28879 Orang	284,500,000		
1	02	02	202	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi										
						Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	76165 Orang	30,000,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		76165 Orang	33,000,000		
1	02	02	202	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus										
						Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6297 Orang	30,000,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		6297 Orang	33,000,000		
1	02	02	202	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat										
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	496 Orang	76,540,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		496 Orang	82,000,000		
1	02	02	202	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis										
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5494 Orang	241,547,880	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		5494 Orang	255,712,668		
1	02	02	202	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV										
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6603 Orang	164,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		6603 Orang	179,500,000		
1	02	02	202	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	75,000,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	85,000,000		
1	02	02	202	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana										

						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1 Dokumen	1,200,000			
1	02	02	202	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,733,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	2,000,000,000			
1	02	02	202	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	1,200,000			
1	02	02	202	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	330,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5 Dokumen	350,000,000			
1	02	02	202	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	100,000,000			
1	02	02	202	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	407,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 Dokumen	407,900,000			
1	02	02	202	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular										
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	497,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Dokumen	553,500,000			
1	02	02	202	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat										
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	25,375,136,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Dokumen	26,000,000,000			
1	02	02	202	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah										

						Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	1,200,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 Orang	1,200,000			
1	02	02	202	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional											
						Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	47,000,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 Paket	55,000,000			
1	02	02	202	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat											
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1,000,000			
1	02	02	202	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan											
						Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	10,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		10 Unit	15,000,000			
1	02	02	202	33	Operasional Pelayanan Puskesmas											
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Dokumen	1,000,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		10 Dokumen	1,000,000,000			
1	02	02	202	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota											
						Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Unit	600,000,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		9 Unit	100,000,000			
1	02	02	202	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)											
						Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	250,000,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		10 Unit	250,000,000			
1	02	02	202	39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga											
						Jumlah Keluarga Yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125 Keluarga	15,000,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		125 Keluarga	20,000,000			
1	02	02	202	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis											

						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1018 Orang	201,163,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1018 Orang	213,509,300		
1	02	02	202	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)									
						Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	390 Orang	65,000,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	390 Orang	70,000,000		
1	02	02	202	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria									
						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	113,545,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	100 Orang	121,899,500		
1	02	02	202	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok									
						Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Tatanan	100,000,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	2 Tatanan	120,000,000		
1	02	02	203		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							56,000,000		86,000,000
1	02	02	203	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	11,000,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Dokumen	11,000,000		
1	02	02	203	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan									
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Dokumen	25,000,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	11 Dokumen	25,000,000		
1	02	02	203	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet									
						Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	20,000,000	Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum	1 Unit	50,000,000		
1	02	02	204		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							62,000,000		62,000,000
1	02	02	204	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya									

					Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31 Unit	32,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		31 Unit	32,000,000			
1	02	02	204	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan										
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	30,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		10 Unit	30,000,000			
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							901,000,000			965,000,000
1	02	03	202		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							55,000,000			65,000,000
1	02	03	202	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan										
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	55,000,000			
1	02	03	202	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar										
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	5,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		60 Orang	10,000,000			
1	02	03	203		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							846,000,000			900,000,000
1	02	03	203	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	846,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		100 Orang	900,000,000			
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							449,445,000			454,445,000
1	02	04	201		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							78,445,000			78,445,000
1	02	04	201	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	76,445,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2 Dokumen	76,445,000			
1	02	04	201	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)										

					Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Sarana	1,000,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		2 Sarana	1,000,000
1	02	04	201	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							
					Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Sarana	1,000,000	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum		2 Sarana	1,000,000
1	02	04	203		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			140,000,000				140,000,000
1	02	04	203	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	140,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2 Dokumen	140,000,000
1	02	04	204		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			50,000,000				55,000,000
1	02	04	204	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1 Dokumen	55,000,000
1	02	04	206		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			181,000,000				181,000,000
1	02	04	206	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan							

					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	90 Unit	180,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		90 Unit	180,000,000			
1	02	04	206	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga										
					Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1,000,000			
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN							866,219,600			915,457,600
1	02	05	201		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							114,457,600			114,457,600
1	02	05	201	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat										
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	114,457,600	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2 Dokumen	114,457,600			
1	02	05	202		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							1,000,000			1,000,000
1	02	05	202	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat										
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	1,000,000			
1	02	05	203		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							750,762,000			800,000,000
1	02	05	203	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)										
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	750,762,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2 Dokumen	800,000,000			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3,457,316,655			3,473,500,000
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							3,457,316,655			3,473,500,000
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK							172,600,000			172,600,000
2	14	02	201		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk							40,000,000			40,000,000
2	14	02	201	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota										
					Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		1 Dokumen	20,000,000			
2	14	02	201	05	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal										

					Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		7 Dokumen	20,000,000
2	14	02	202		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			132,600,000				132,600,000
2	14	02	202	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga							
					Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	38,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Laporan	38,400,000
2	14	02	202	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB							
					Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	94,200,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Dokumen	94,200,000
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			2,417,116,655				2,433,300,000
2	14	03	201		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			645,736,655				660,000,000
2	14	03	201	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja							
					Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Organisasi	120,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Organisasi	120,000,000
2	14	03	201	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK							
					Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	139,986,755	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Unit	150,000,000
2	14	03	201	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)							
					Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	65,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Laporan	65,000,000
2	14	03	201	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK							

					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	240,749,900	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Laporan	245,000,000
2	14	03	201	08	Pengendalian Program KKBPK							
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	80,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Laporan	80,000,000
2	14	03	202		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			79,430,000				80,000,000
2	14	03	202	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)							
					Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	26 Orang	79,430,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		26 Orang	80,000,000
2	14	03	203		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			1,430,450,000				1,431,800,000
2	14	03	203	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya							
					Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	31,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		36 Laporan	31,800,000
2	14	03	203	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)							
					Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	398,650,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Orang	400,000,000
2	14	03	203	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB							
					Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	1,000,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Unit	1,000,000,000
2	14	03	204		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			261,500,000				261,500,000
2	14	03	204	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB							
					Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	184,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Dokumen	184,000,000
2	14	03	204	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB							

					Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Kampung	77,500,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Kampung	77,500,000
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			867,600,000				867,600,000
2	14	04	201		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			867,600,000				867,600,000
2	14	04	201	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							
					Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	360,000,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3 Unit	360,000,000
2	14	04	201	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							
					Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Orang	478,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5 Orang	478,800,000
2	14	04	201	06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							
					Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	- Kota Singkawang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kelompok	28,800,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3 Kelompok	28,800,000
TOTAL								251,020,733,191				251,704,111,220

BAB V

PENUTUP

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di dalam Renja Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang 2023-2026, di dalam pelaksanaannya tetap menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Renja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Bidang, sub koordinator dan sekretariat.
- b. Memfokuskan pada pencapaian target dari indikator SPM dan SDG's.
- c. Dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber APBD Kota maupun APBN/DAK Fisik dan Non Fisik.
- d. Di dalam proses penyusunannya tetap memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya (RPJMN, RPJMD, RKPD dan Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana).
- e. Renja Dinas Kesehatan tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tahun 2024 merupakan rencana kerja tahun kedua bagi pemerintahan daerah Kota Singkawang yang memasuki masa tenggang bagi pelaksanaan pemerintahan daerah Kota Singkawang. Fungsi Renja tahun 2024 sebagai pedoman operasional pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMN Kementerian Kesehatan, RPJMD maupun Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang.

Sebagai pedoman kerja, pelaksanaan Renja seyogyanya mengikuti kaedah-kaedah dimana seluruh aparaturnya Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana dan jajarannya melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku, serta fokus pada sasaran dan tujuan program yang telah ditentukan.

Demikian Renja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tahun 2024 ini dituangkan semoga dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan kesehatan di Kota Singkawang.

Singkawang, Oktober 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Dan Keluarga Berencana



dr. Alexander, Sp.PD
NIP.19711219 200502 1 00